

# Local Development Agenda in the Local Government Information System in Sidoarjo Regency

## [Agenda Pembangunan Lokal dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah di Kabupaten Sidoarjo]

Achmad Shobich<sup>1)</sup>, Totok Wahyu Abadi<sup>\*2)</sup>, Ahmad Riyadh<sup>3)</sup>.

<sup>1)</sup>Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

<sup>2)</sup> Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

<sup>3)</sup> Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

\*Email Penulis Korespondensi: [totokwahyu@umsida.ac.id](mailto:totokwahyu@umsida.ac.id)

**Abstract.** *This study examines the role of the Local Government Information System (SIPD) as a digital governance instrument in supporting the local development agenda in Sidoarjo Regency, focusing on its mechanism of influence on the budgeting process, development financing, and fiscal transparency through the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) framework. The approach used is qualitative with the research location at the Regional Development Planning Agency (Bappeda) and the Communication and Information Agency (Diskominfo) of Sidoarjo Regency. Primary data was obtained through in-depth interviews, field observations with informants from Bappeda and supporting informants from Diskominfo who were selected purposively. Secondary data was sourced from relevant scientific literature. The results of the study show that SIPD is perceived to increase work efficiency, organize data, and strengthen reporting, thereby strengthening the order of budget planning administration and internal accountability (audit trail). However, the impact on public fiscal transparency is still limited because SIPD is internal (civil servant access), public data readiness tends to be delayed, and public information channels face access/security constraints. In addition, facilitating conditions become the most critical obstacle due to downtime at certain hours and dependence on central infrastructure, which risks disrupting the execution moment (input, verification, submit). Overall, the impact of SIPD on development financing and fiscal transparency is conditionally strengthened when service stability, data readiness, and public channel security are met.*

**Keywords** - Local Development; SIPD, Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT); Digitalization; Fiscal Transparency

**Abstrak.** *Penelitian ini mengkaji peran Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai instrumen tata kelola digital dalam mendukung agenda pembangunan lokal di Kabupaten Sidoarjo, dengan fokus pada mekanisme pengaruhnya terhadap proses penganggaran, pembiayaan pembangunan, dan transparansi fiskal melalui kerangka Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT). Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan lokasi penelitian di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kabupaten Sidoarjo. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan dengan informan dari Bappeda dan informan pendukung dari Diskominfo yang dipilih secara purposive. Data sekunder bersumber dari literatur ilmiah relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIPD dipersepsikan meningkatkan efisiensi kerja, merapikan data, dan memperkuat pelaporan sehingga memperkuat ketertiban administrasi perencanaan penganggaran serta jejak akuntabilitas internal (audit trail). Namun, dampak terhadap transparansi fiskal publik masih tertahan karena SIPD bersifat internal (akses ASN), kesiapan data publik cenderung terlambat, dan kanal informasi publik menghadapi kendala akses/keamanan. Selain itu, facilitating conditions menjadi hambatan paling kritis akibat downtime pada jam tertentu dan ketergantungan pada infrastruktur pusat, yang berisiko mengganggu momen eksekusi (input, verifikasi, submit). Secara keseluruhan, pengaruh SIPD terhadap pembiayaan pembangunan dan transparansi fiskal bersifat kondisional menguat ketika stabilitas layanan, kesiapan data, dan keamanan kanal publik terpenuhi.*

**Kata Kunci** - Pembangunan Lokal; SIPD; Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT); Digitalisasi; Transparansi fiskal

## I. PENDAHULUAN

Pembangunan lokal adalah proses strategis yang melibatkan pemerintah daerah dan partisipasi aktif masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup di berbagai sektor sosial, ekonomi, politik, dan budaya dengan bertumpu pada potensi lokal [1]. Tujuan dari pendekatan ini adalah memperkuat otonomi daerah melalui pemanfaatan sumber daya lokal, penguatan kapasitas masyarakat, serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif [2]. Manfaat dari pembangunan lokal antara lain menciptakan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat,

Copyright © Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. This preprint is protected by copyright held by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo and is distributed under the Creative Commons Attribution License (CC BY). Users may share, distribute, or reproduce the work as long as the original author(s) and copyright holder are credited, and the preprint server is cited per academic standards.

Authors retain the right to publish their work in academic journals where copyright remains with them. Any use, distribution, or reproduction that does not comply with these terms is not permitted.

mendorong pemerataan pembangunan lintas sektor, memperbaiki kualitas tata kelola, serta menumbuhkan inovasi berbasis komunitas [3]. Dalam pelaksanaannya, pembangunan lokal membutuhkan dukungan sistem yang mampu mengintegrasikan data, memperkuat koordinasi antarpihak, dan meningkatkan partisipasi masyarakat secara menyeluruh. Salah satu instrumen penting dalam mendukung hal tersebut adalah Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), yaitu platform digital terintegrasi yang dirancang untuk meningkatkan transparansi, efisiensi pengelolaan data pembangunan, dan memperluas keterlibatan publik dalam proses perencanaan [4]. Oleh karena itu, analisis terhadap efektivitas SIPD menjadi relevan untuk memahami sejauh mana sistem ini mampu menjawab tantangan implementasi pembangunan lokal, terutama dalam konteks daerah seperti Kabupaten Sidoarjo yang tengah mengupayakan transformasi tata kelola pemerintahan berbasis digital [5].

Permasalahan pembangunan lokal di secara umum menunjukkan belum optimalnya kesiapan banyak daerah dalam mengelola otonomi secara efektif dan memanfaatkan digitalisasi pemerintahan secara maksimal [6]. Dibandingkan dengan negara-negara seperti Filipina dan India yang telah berhasil mengembangkan pembangunan berbasis lokal melalui penguatan kapasitas kelembagaan desa dan penerapan sistem perencanaan yang melibatkan partisipasi, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan signifikan, termasuk ketimpangan fiskal, rendahnya kualitas sumber daya manusia, serta ketidakmerataan dalam pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola daerah [7]. Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) sebagai bagian dari transformasi digital dalam pemerintahan masih belum mencapai tingkat optimal, hal ini disebabkan oleh keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, kurangnya koordinasi antar pemerintah, serta rendahnya tingkat literasi digital baik di kalangan aparatur maupun masyarakat [8]. Fenomena lain yang muncul adalah kesenjangan pembangunan antara daerah yang memiliki infrastruktur dan sumber daya memadai dengan daerah yang tertinggal secara digital, yang mengakibatkan ketimpangan akses terhadap sistem informasi, transparansi, dan partisipasi dalam perencanaan pembangunan [9]. Dalam hal ini, masyarakat memiliki peran yang sangat penting, tidak hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai motor penggerak utama dalam mengarahkan pembangunan yang berbasis pada kebutuhan lokal. Hal ini dapat diwujudkan melalui partisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), pengawasan publik, serta pemanfaatan saluran digital seperti e-planning [10]. Oleh karena itu, penguatan literasi digital, peningkatan kapasitas kelembagaan desa, serta sinergi antara masyarakat sipil dan pemerintah menjadi kunci untuk memastikan keberhasilan implementasi SIPD sebagai sistem yang mendukung transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pembangunan lokal di era otonomi dan digitalisasi [11].

Berbagai kajian menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan lokal tidak hanya ditentukan oleh kebijakan desentralisasi dan potensi wilayah, tetapi juga oleh efektivitas pemanfaatan sistem informasi digital seperti SIPD sebagai instrumen tata kelola yang transparan dan partisipatif [12]. Di Kabupaten Sidoarjo, inovasi pelayanan publik melalui pemanfaatan SIPD terbukti mampu meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam perencanaan pembangunan, namun implementasinya masih menghadapi kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran yang belum memadai [13]. Penelitian lain menegaskan bahwa pelatihan dan penguatan kapasitas aparatur memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan integrasi SIPD dalam sistem kerja pemerintah daerah, yang berujung pada meningkatnya efektivitas layanan publik [14]. Pencapaian Kabupaten Sidoarjo dalam ajang Innovation Government Award (IGA) 2020 juga menjadi indikator keberhasilan transformasi digital di tingkat lokal, meskipun tantangan teknis seperti interoperabilitas data dan resistensi terhadap perubahan masih menjadi hambatan yang harus diatasi [15]. Dalam konteks evaluasi sistem informasi, sejumlah studi menekankan pentingnya pendekatan model Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) untuk mengukur sejauh mana faktor seperti ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha, pengaruh sosial, dan kondisi fasilitas memengaruhi penerimaan pengguna terhadap SIPD [16]. Temuan-temuan tersebut memperkuat bahwa keberlanjutan pembangunan lokal sangat bergantung pada kesiapan digital, kualitas pelatihan SDM, dan kemampuan daerah dalam membangun sistem informasi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan adaptif terhadap perubahan teknologi [17].

Penelitian ini menggunakan pendekatan teori UTAUT (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology) yang dikembangkan oleh Venkatesh et al. (2003) sebagai kerangka analisis utama untuk mengevaluasi penerimaan dan efektivitas implementasi SIPD dalam mendukung pembangunan lokal [18]. Teori ini mengemukakan bahwa adopsi dan pemanfaatan teknologi dalam suatu organisasi dipengaruhi oleh empat faktor utama. Pertama, performance expectancy atau ekspektasi kinerja, yang merujuk pada sejauh mana individu meyakini bahwa penggunaan teknologi akan meningkatkan efektivitas dan produktivitas dalam pekerjaan mereka. Kedua, effort expectancy atau ekspektasi kemudahan, yang mengacu pada persepsi pengguna mengenai sejauh mana teknologi tersebut dapat digunakan dengan mudah. Ketiga, social influence atau pengaruh sosial, yang merujuk pada sejauh mana individu merasa terdorong untuk mengadopsi teknologi karena faktor pengaruh dari lingkungan sosialnya, seperti atasan, rekan kerja, atau norma yang berlaku dalam organisasi. Keempat, facilitating conditions atau kondisi yang memfasilitasi, yang merujuk pada persepsi mengenai dukungan yang diberikan oleh organisasi serta ketersediaan infrastruktur teknis yang diperlukan untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi. Dengan menggunakan teori ini, penelitian dapat mengidentifikasi faktor-faktor utama yang memengaruhi penerimaan SIPD oleh aparatur pemerintahan dan masyarakat, serta menilai sejauh mana sistem ini dapat mendorong keberhasilan pembangunan lokal secara berkelanjutan [19]. Penerapan

UTAUT dalam konteks ini juga relevan untuk memahami dinamika perubahan organisasi dan kesiapan digital yang menjadi prasyarat penting dalam tata kelola pemerintahan modern [20].

Secara teoretis, pendekatan UTAUT menegaskan bahwa keberhasilan implementasi teknologi informasi dalam sektor publik dipengaruhi oleh empat elemen kunci, yaitu ekspektasi kinerja, kemudahan penggunaan, pengaruh sosial, dan ketersediaan dukungan organisasi [21]. Dalam konteks ideal, keempat konstruk tersebut seharusnya menciptakan sistem informasi yang efektif, diterima secara luas, dan digunakan secara optimal oleh pengguna. Namun, realitas di lapangan, khususnya di Kabupaten Sidoarjo, menunjukkan adanya gap yang cukup signifikan antara teori dan praktik [22]. Tantangan utama dalam optimalisasi pemanfaatan SIPD terletak pada rendahnya literasi digital di kalangan aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat, keterbatasan jumlah serta kualitas sumber daya manusia, anggaran yang belum mencukupi, serta kendala teknis terkait pengelolaan dan interoperabilitas sistem ini [23]. Selain itu, pengaruh sosial belum cukup kuat untuk mendorong perubahan perilaku digital di lingkungan birokrasi yang cenderung resistif terhadap inovasi. Kondisi ini memperkuat urgensi dilakukannya kajian empiris terhadap faktor-faktor penerimaan dan penggunaan SIPD menggunakan perspektif UTAUT agar dapat ditemukan strategi yang tepat dalam mengatasi hambatan tersebut. Penelitian ini penting tidak hanya untuk memberikan pemahaman akademik tentang dinamika penerapan teknologi dalam pembangunan lokal, tetapi juga sebagai dasar penyusunan rekomendasi praktis guna mengoptimalkan fungsi SIPD dalam mendukung agenda pembangunan yang lebih transparan, partisipatif, dan berkelanjutan [24].

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai faktor yang memengaruhi penerimaan dan pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dengan mengacu pada kerangka Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT), guna mendukung pelaksanaan pembangunan lokal yang berkelanjutan di Kabupaten Sidoarjo [25]. Teori UTAUT menyoroti empat konstruk utama yang menjadi dasar dalam mengevaluasi penerimaan teknologi, yaitu performance expectancy (harapan peningkatan kinerja), effort expectancy (kemudahan penggunaan), social influence (pengaruh sosial), dan facilitating conditions (dukungan infrastruktur dan organisasi) [26]. Dengan mengadopsi perspektif ini, penelitian mengkaji bagaimana persepsi aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat terhadap SIPD memengaruhi efektivitas penggunaannya dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan [27]. Fokus utama kajian ini juga diarahkan pada evaluasi peran SIPD dalam memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik, khususnya dalam mendorong keterlibatan masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) dan kanal digital pemerintahan [28]. Kajian ini tidak hanya memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan studi penerimaan teknologi informasi di sektor publik, tetapi juga memiliki manfaat praktis dalam menyusun strategi optimalisasi SIPD guna mendukung pembangunan daerah yang efektif, inklusif, dan berkelanjutan [29]. Selain itu, penelitian ini memperkaya ilmu komunikasi pemerintahan, khususnya dalam penguatan komunikasi publik berbasis teknologi digital yang menjadi elemen penting dalam tata kelola modern [30].

## II. METODE

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan lokasi penelitian yang berfokus pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Sidoarjo. Fokus penelitian mengacu pada Teori UTAUT (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology) yang memiliki empat komponen utama, yaitu ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha, faktor sosial, dan kondisi yang memfasilitasi [30]. Informan penelitian terdiri dari Nawang Wulan sebagai key informan dari Bappeda Kabupaten Sidoarjo, serta Muhammad Habibie dan Muti Ulvia Rarani sebagai informan pendukung dari Diskominfo Kabupaten Sidoarjo. Adapun informan tambahan yakni Eko Susanto dari Diskominfo Jawa Timur, Heri Susanto dari Bappeda Kabupaten Sidoarjo, dan Ahmad Riyadh dari Administrasi Publik Umsida. Pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik purposive saampling, yaitu metode pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kesesuaian kriteria, relevansi peran, serta tingkat pengetahuan mereka terhadap topik penelitian [31].

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci dan pendukung, serta observasi langsung di lapangan yang relevan dengan implementasi agenda pembangunan lokal dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) di Kabupaten Sidoarjo. Selain itu, dokumentasi berupa foto kegiatan dan catatan penting juga dikumpulkan setelah proses wawancara. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari literatur ilmiah yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengacu pada model interaktif Miles & Huberman (2014), yang menekankan pentingnya proses penyajian data dan penarikan kesimpulan secara berulang, hingga menghasilkan temuan yang sah dan valid. Analisis ini terdiri dari dua tahapan, yaitu: (1) penyajian data sesuai fokus penelitian berdasarkan komponen teori UTAUT, sehingga memudahkan identifikasi hubungan antar-temuan; dan (2) penarikan serta verifikasi kesimpulan melalui pengecekan berulang terhadap data untuk memastikan keakuratan dan konsistensi hasil penelitian [32].

Selain wawancara dengan informan mengenai adopsi SIPD dalam penganggaran dan transparansi fiskal, penelitian ini juga menyelidiki bagaimana SIPD berkontribusi dalam meningkatkan pengelolaan pembiayaan pembangunan

regional. Wawancara dilakukan dengan Bappeda dan Diskominfo Sidoarjo untuk mengumpulkan informasi mengenai implementasi SIPD dalam pengelolaan dan perencanaan pembiayaan pembangunan (Nasution et al. 2021).

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Gambaran Umum SIPD dan Konteks Implementasi di Kabupaten Sidoarjo

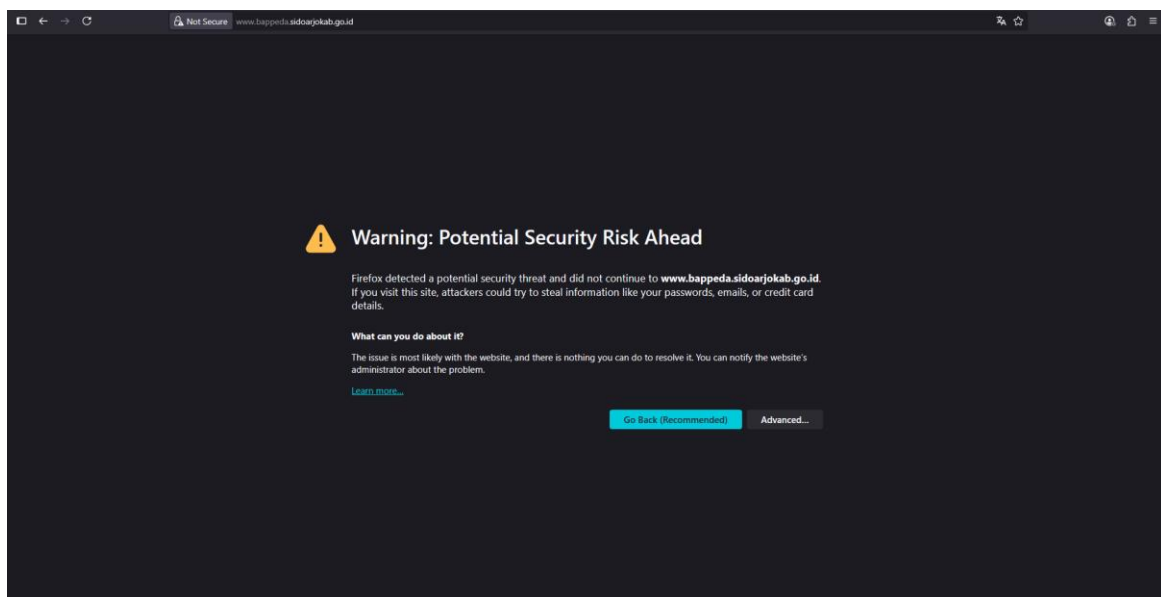
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan aplikasi resmi yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mengintegrasikan proses penyelenggaraan pemerintahan daerah secara end-to-end, mencakup perencanaan pembangunan, penganggaran, pelaporan, serta evaluasi dalam satu sistem berbasis data terintegrasi. Secara normatif, SIPD ditujukan untuk menyediakan basis data pembangunan yang lebih valid, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, serta memastikan tata kelola pemerintahan daerah berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks Kabupaten Sidoarjo, penerapan SIPD diposisikan sebagai strategi penguatan integrasi perencanaan, penyusunan anggaran, pelaporan, dan evaluasi. Pemerintah daerah diharapkan mampu menyusun perencanaan pembangunan secara lebih terstruktur dan berbasis data, sehingga alokasi anggaran dapat lebih terukur dan selaras dengan kebutuhan masyarakat. Namun, temuan lapangan menunjukkan bahwa manfaat ideal SIPD belum sepenuhnya terwujud karena implementasinya belum berjalan secara langsung dan menyeluruh.

Salah satu indikator kendala implementasi tampak pada kanal informasi publik. Penelitian menemukan adanya permasalahan akses pada situs resmi Bappeda Kabupaten Sidoarjo yang memunculkan peringatan keamanan pada peramban web, sehingga masyarakat tidak dapat mengakses informasi pembangunan secara optimal. Kondisi ini berimplikasi pada terbatasnya keterbukaan informasi publik, menurunnya peluang pengawasan berbasis data, serta melemahnya fungsi pelayanan digital pemerintah daerah.

#### SIPD dalam Perspektif UTAUT

Penelitian ini menganalisis penerimaan dan penggunaan SIPD menggunakan kerangka Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT). UTAUT menegaskan bahwa intensi dan perilaku penggunaan teknologi dipengaruhi oleh empat konstruk utama performance expectancy, effort expectancy, social influence, dan facilitating conditions (Vankatesh et al., 2023). Kerangka ini relevan untuk menjelaskan adopsi teknologi di sektor publik karena penerimaan sistem tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis, melainkan juga oleh dukungan organisasi, norma institusional, dan kesiapan infrastruktur.



Gambar 1: Tampilan Web SIPD Bappeda  
Sumber: <https://www.bappeda.sidoarjokab.go.id/>

Secara konseptual, implementasi SIPD yang terintegrasi seharusnya menjadi fondasi transparansi anggaran dan fiskal, karena proses perencanaan, penganggaran, hingga pelaporan berada dalam satu basis data yang dapat ditelusuri. Dalam kerangka tata kelola fiskal, integrasi tersebut berpotensi memperkecil ketidaksesuaian program anggaran,

meningkatkan ketertiban administrasi, serta memperkuat jejak akuntabilitas (audit trail) dalam penyusunan dan realisasi anggaran.

Namun, temuan penelitian di Kabupaten Sidoarjo menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas tersebut dengan realitas implementasi. SIPD masih bersifat internal dan hanya dapat diakses oleh aparatur sipil negara (ASN), sedangkan kanal publik mengalami kendala akses dan keamanan. Selain itu, data yang direncanakan untuk dibuka ke publik belum sepenuhnya siap dan cenderung terlambat, sehingga transparansi fiskal belum berjalan optimal. Kondisi ini memperlihatkan bahwa penerapan SIPD belum sepenuhnya berfungsi sebagai sarana transparansi yang memungkinkan masyarakat menilai keterhubungan antara usulan pembangunan, prioritas, alokasi anggaran, dan realisasi program.

Di sisi operasional, terdapat kendala berupa gangguan akses (downtime) pada jam-jam tertentu akibat ketergantungan pada infrastruktur pusat. Hal ini berpotensi mengganggu ritme kerja perangkat daerah, khususnya pada tahap input, verifikasi, dan submit data. Konsekuensi langsungnya adalah meningkatnya risiko keterlambatan proses administrasi penganggaran dan turunnya reliabilitas sistem pada momen eksekusi yang krusial.

### Ekspektasi Kinerja (Performance Expectation)

Menurut UTAUT, performance expectancy merujuk pada tingkat keyakinan individu bahwa penggunaan sistem akan meningkatkan kinerja (Venkatesh et al., 2003). Temuan penelitian menunjukkan bahwa ekspektasi kinerja merupakan determinan paling dominan dalam mendorong niat penggunaan SIPD oleh aparatur di Kabupaten Sidoarjo. SIPD dipersepsikan mampu mempercepat proses kerja, menata data lebih rapi, dan meningkatkan kualitas pelaporan.

#### A. Keterampilan Kinerja

Keterampilan kinerja (performance skills) mengacu pada kemampuan individu dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan yang menjadi kewajibannya. Keterampilan ini sangat krusial untuk menjamin efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan pekerjaan, khususnya dalam konteks pengelolaan sistem teknologi seperti Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Salah satu cara mengukur keterampilan kinerja adalah dengan melihat sejauh mana penggunaan sistem dapat meningkatkan prestasi kerja, yang mencakup kemampuan untuk menyelesaikan tugas dengan lebih cepat, menghasilkan output yang lebih baik, dan meningkatkan alur kerja yang sebelumnya mungkin terhambat oleh sistem manual atau tradisional.

Hasil wawancara dengan tiga informan mengenai penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kabupaten Sidoarjo menunjukkan bahwa ekspektasi kinerja memiliki dampak yang signifikan terhadap niat untuk menggunakan sistem tersebut. Para informan menilai bahwa SIPD berpotensi besar dalam meningkatkan kualitas kerja, khususnya dalam hal efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas di lingkungan pemerintahan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa keyakinan pengguna terhadap manfaat praktis suatu sistem informasi menjadi faktor penentu utama dalam penerimaan teknologi. Temuan ini sejalan dengan teori Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT), yang menyatakan bahwa ekspektasi kinerja merupakan salah satu variabel utama yang memengaruhi niat atau intensi individu dalam mengadopsi dan menggunakan suatu sistem. Berdasarkan wawancara, terungkap bahwa pengelolaan SIPD di Sidoarjo juga ditunjang oleh adanya kegiatan pelatihan, meskipun sifatnya masih sebatas pelatihan dasar atau basic training. Berikut hasil wawancara dengan Muhammad Habibie selaku Pranata Komputer Penelia Diskominfo Sidoarjo pada tanggal 20 Maret 2025, beliau mengatakan:

*" Kalau dalam pengelolaan SIPD, pengelolaan pelatihannya seperti pelatihan basic. Karena memang untuk SIPD, ini kan sistem informasi pemerintahan daerah. Jadi memang aplikasi yang harus dimiliki oleh seluruh pemerintahan daerah, termasuk pemerintahan Kabupaten Sidoarjo. Untuk SIPD sendiri, sebenarnya ada tim di luar SPBE yang mengerjakan. Tapi masih tetap berkolerasi ya. Karena SIPD memang setiap staff itu diharuskan minimal mengetahui untuk fungsi dari SIPD itu sendiri. Dan memang ada beberapa orang, perwakilan dari bidang itu yang bisa mengerjakan tugas-tugas itu "*

Pelatihan yang bersifat dasar ini penting untuk memastikan bahwa seluruh staf pemerintahan daerah memiliki pemahaman yang cukup mengenai fungsi utama Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Meski hanya mencakup aspek dasar, pelatihan ini memastikan setiap staf dapat mengoperasikan aplikasi dengan baik, yang merupakan prasyarat bagi kelancaran administrasi pemerintahan daerah. Namun, meskipun pelatihan ini telah mencakup hal-hal mendasar, peran perwakilan bidang yang lebih spesifik sangat diperlukan untuk menjalankan tugas-tugas teknis yang lebih kompleks.

Dengan pemahaman dasar yang dimiliki oleh seluruh staf dan adanya tim yang lebih spesifik dalam tugas teknis, koordinasi antar unit kerja menjadi lebih efisien. Hal ini sangat terkait dengan tujuan SIPD yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi dalam perencanaan dan pengelolaan pembangunan di tingkat daerah. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, pelatihan yang diberikan dalam pengelolaan SIPD umumnya masih sebatas pelatihan dasar. Selanjutnya hasil wawancara menurut Ibu Nawang Wulan selaku Kepala Bidang Perencana Pengendalian & Evaluasi Litbang Bappeda Sidoarjo pada tanggal 13 Maret 2025, beliau mengatakan:

*“Pelatihan SIPD sebanyak 3 kali, Pelatihan SIPD meliputi penggunaan aplikasi yaitu pelatihan khusus untuk mempelajari cara menggunakan aplikasi SIPD, perencanaan dan penganggaran daerah yaitu pelatihan yang membantu pemahaman tentang bagaimana SIPD dapat digunakan untuk menyusun perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, serta pemantauan dan evaluasi pembangunan pelatihan ini fokus pada cara menggunakan SIPD untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan proyek pembangunan di daerah”*

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pelatihan terkait SIPD mencakup tiga aspek utama, yaitu pelatihan penggunaan aplikasi SIPD untuk pengoperasian dan pengelolaan data, pelatihan perencanaan dan penganggaran daerah guna mendukung efisiensi serta transparansi, serta pelatihan pemantauan dan evaluasi pembangunan yang berfokus pada pemantauan proyek dan identifikasi kendala pelaksanaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhammad Habibie dan Nawang Wulan, dapat disimpulkan bahwa pelatihan SIPD di Kabupaten Sidoarjo masih berfokus pada pelatihan dasar, namun sudah mencakup aspek penting dalam pengelolaan pemerintahan daerah.

## **B. Peningkatan Prestasi Kerja**

Peningkatan prestasi kerja adalah proses berkelanjutan yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas dan kuantitas hasil kerja individu maupun tim dalam suatu organisasi. Dalam konteks pengelolaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kabupaten Sidoarjo, peningkatan prestasi kerja tidak hanya terlihat dari hasil akhir, tetapi juga dari sejauh mana pegawai dapat beradaptasi dengan teknologi yang diterapkan. Hal ini mencakup pemahaman sistem, kemampuan untuk mengoperasikan aplikasi, serta efisiensi dalam menggunakan data untuk mendukung pengambilan keputusan.

Terkait dengan upaya peningkatan kapasitas kinerja, wawancara menunjukkan bahwa pengembangan kompetensi pegawai telah direncanakan secara sistematis. Pelatihan dilaksanakan baik secara terjadwal maupun dinamis sesuai kebutuhan. Narasumber menjelaskan bahwa pelatihan tidak hanya terbatas pada bidang inti, tetapi juga mencakup keilmuan penunjang seperti cybersecurity dan data science. Hal tersebut didukung oleh pernyataan Muhammad Habibie, Staf Peranata Komputer Penyelia Diskominfo Sidoarjo, 20 Maret 2025, yang mengatakan:

*“Misalnya, ketika ada pelatihan yang dibutuhkan. Kami tetap ikut meskipun bidangnya tidak secara langsung berkaitan dengan data atau keamanan cyber, agar tetap mendapatkan ilmu tambahan. Hal ini penting karena dalam pekerjaan tim, setiap orang sebaiknya memiliki kompetensi yang relatif sejalan. Jika SIPD dapat berjalan dengan baik, maka pekerjaan kami bisa diselesaikan lebih cepat dan data yang dihasilkan juga lebih rapi untuk dilaporkan.”*

Pernyataan ini menegaskan bahwa manfaat kinerja yang diharapkan menjadi salah satu faktor kunci dalam mendorong penerimaan dan pemanfaatan sistem tersebut.

Selanjutnya hasil wawancara menurut Nawang Wulan selaku Kepala Bidang Perencana Pengendalian & Evaluasi Litbang Bappeda Sidoarjo pada tanggal 13 Maret 2025, beliau mengatakan:

*“Peningkatan kinerja perencanaan pembangunan dapat dilakukan dengan mengikuti pelatihan, memperdalam pengetahuan regulasi, serta meningkatkan kemampuan analisis data, manajerial, dan kepemimpinan. Pemanfaatan SIPD menjadi kunci dalam pengelolaan data, anggaran, dan pelaporan agar lebih efisien serta transparan. Selain itu, pemantauan dan evaluasi rutin perlu dilakukan untuk memastikan kesesuaian program dengan tujuan. Kolaborasi dengan pemangku kepentingan dan masyarakat juga penting guna menciptakan pembangunan yang inklusif. Belajar dari pengalaman dan studi kasus pembangunan sebelumnya, ditambah kemampuan komunikasi dan penyusunan laporan yang baik, akan memperkuat kualitas perencanaan dan hasil pembangunan daerah.”*

Pernyataan ini menegaskan bahwa peningkatan kinerja perencanaan pembangunan membutuhkan kombinasi antara pengembangan kompetensi individu, pemanfaatan teknologi seperti SIPD, serta penerapan prinsip transparansi, evaluasi berkelanjutan, dan kolaborasi dengan berbagai pihak agar tercapai perencanaan yang lebih efektif, inklusif, dan berkualitas.

Selanjutnya hasil wawancara menurut Muti Ulvia Rarani selaku Pranata Komputer Mahir Diskominfo Sidoarjo pada tanggal 20 Maret 2025, beliau mengatakan:

*“Saya selalu memiliki komitmen untuk terus belajar dan terbuka terhadap hal-hal baru yang dapat meningkatkan keterampilan. Upaya ini saya lakukan dengan mengikuti pelatihan, workshop, maupun pembelajaran mandiri terkait perencanaan pembangunan dan pemanfaatan teknologi, seperti penggunaan SIPD. Selain itu, saya juga aktif mencari referensi, membaca regulasi terbaru, serta berdiskusi dengan rekan kerja atau ahli di bidangnya agar wawasan semakin luas. Dengan cara tersebut, kemampuan kinerja saya dapat terus berkembang sesuai kebutuhan organisasi dan tuntutan pembangunan daerah.”*

Pernyataan ini menegaskan bahwa komitmen untuk terus belajar melalui pelatihan, pemanfaatan teknologi, pembaruan pengetahuan, serta diskusi dengan berbagai pihak menjadi kunci utama dalam meningkatkan keterampilan dan menjaga kinerja agar selaras dengan kebutuhan organisasi serta tuntutan pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhammad Habibie, Muti Ulvia Rarani dan Nawang Wulan ditemukan bahwa peningkatan prestasi kerja sangat dipengaruhi oleh pelatihan dan pengembangan kompetensi pegawai. Muhammad Habibie, Staf Peranata Komputer Penyelia di Diskominfo Sidoarjo, menyatakan bahwa pelatihan dasar untuk SIPD sangat penting karena setiap pegawai diharuskan memahami fungsi dasar sistem ini, meskipun tidak semuanya terlibat dalam pengelolaan teknis secara langsung.

Lebih lanjut, Nawang Wulan, Kepala Bidang Rendalev Litbang Bappeda Sidoarjo, menambahkan bahwa pelatihan yang mencakup aspek perencanaan, penganggaran, serta pemantauan pembangunan tidak hanya meningkatkan keterampilan teknis, tetapi juga kemampuan analitis dan manajerial. Dalam praktiknya, peningkatan prestasi kerja juga bergantung pada kemampuan berkompetisi antar instansi pemerintah.

### C. Kemampuan Berkompetisi

Kemampuan berkompetisi adalah kesanggupan seseorang atau suatu organisasi untuk bersaing secara sehat dalam mencapai tujuan tertentu. Kemampuan ini tercermin dari bagaimana individu atau kelompok dapat memanfaatkan pengetahuan, keterampilan, serta strategi yang dimiliki agar tetap bertahan dan unggul di tengah persaingan. Kemampuan berkompetisi adalah kesanggupan seseorang atau suatu organisasi untuk bersaing secara sehat dalam mencapai tujuan tertentu. Berikut hasil wawancara dengan Habibie selaku Pranata Komputer Penyelia Diskominfo Sidoarjo pada tanggal 20 Maret 2025, beliau mengatakan:

*“Iya, SIPD di Sidoarjo ini sudah terintegrasi dengan berbagai pihak, seperti Bank Jatim dan penyedia barang maupun jasa. Jadi proses pembayaran, pencairan dana, termasuk pemberian hak kepada pegawai bisa dilakukan melalui satu sistem terpadu. Dengan begitu, SIPD sangat memungkinkan terjalinnya kolaborasi antara pemerintah daerah dengan instansi maupun pihak ketiga secara lebih efektif dan transparan.”*

Berdasarkan hasil wawancara, dapat diketahui bahwa implementasi SIPD memungkinkan adanya keterkaitan dan kolaborasi dengan berbagai instansi maupun pihak eksternal. Narasumber menyebutkan bahwa beberapa instansi seperti Bank Jatim serta pihak ketiga, misalnya penyedia barang dan jasa, dapat terintegrasi langsung dengan sistem. Hal ini menunjukkan bahwa SIPD tidak hanya berfungsi secara internal di lingkungan pemerintah daerah, tetapi juga menjembatani hubungan dengan mitra kerja lain yang memiliki peran penting dalam proses administrasi maupun transaksi keuangan. Adapun hasil wawancara dengan Muti Ulvia Rarani selaku Pranata Komputer Mahir Diskominfo Sidoarjo, pada tanggal 20 Maret 2025 beliau menambahkan:

*“Iya karena ada beberapa aplikasi yang secara data dan fungsi membutuhkan data dari opd/instansi lain”*

Berdasarkan hasil wawancara, narasumber menyatakan bahwa penggunaan SIPD memang membantu dalam berkolaborasi dengan instansi lain, karena terdapat beberapa aplikasi yang secara data maupun fungsi membutuhkan dukungan dari OPD atau instansi terkait. Hal ini sejalan dengan indikator kemampuan berkompetisi, yaitu kemampuan suatu organisasi untuk membangun kerja sama dan kolaborasi yang sehat dengan pihak lain demi mencapai tujuan bersama.

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara bersama Nawang Wulan selaku Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian & Evaluasi Litbang Bappeda Sidoarjo pada tanggal 13 Maret 2025 mengatakan:

*“Ya, Secara keseluruhan, penggunaan SIPD mendukung kolaborasi yang lebih baik antar instansi pemerintah, memastikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah berjalan dengan lebih terorganisir, efisien, dan transparan.”*

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa penggunaan SIPD secara keseluruhan telah mendukung peningkatan kolaborasi antarinstansi pemerintah. Melalui sistem ini, proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dapat berjalan dengan lebih terorganisir, efisien, dan transparan. Hal ini mengindikasikan bahwa SIPD tidak sekadar berfungsi sebagai alat teknis dalam pengelolaan data, melainkan juga sebagai media untuk memperkuat koordinasi antar instansi. Dengan adanya keterpaduan data dan informasi, potensi tumpang tindih program dapat diminimalisir, sementara efektivitas dalam pengambilan keputusan dapat ditingkatkan.

Kemampuan berkompetisi merupakan faktor penting yang mencerminkan sejauh mana individu atau organisasi dapat bersaing dengan efektif dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks pengelolaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kabupaten Sidoarjo, kemampuan berkompetisi tercermin dari beberapa aspek utama yang mendukung pengelolaan pelayanan publik dan pembangunan daerah. Salah satunya adalah integrasi SIPD dengan berbagai pihak eksternal, seperti Bank Jatim dan penyedia barang serta jasa. Integrasi ini memungkinkan proses administrasi dan keuangan yang sebelumnya terpisah-pisah dapat disatukan dalam satu sistem yang terpadu. Hal ini memberikan keunggulan kompetitif bagi pemerintah daerah karena mempercepat birokrasi, mengurangi hambatan administratif, dan meningkatkan akurasi data. Dengan adanya sistem terintegrasi ini, pemerintah daerah dapat meningkatkan kecepatan dan adaptabilitas dalam bekerja, memperbaiki daya saing pelayanan publik, serta memberikan respons yang lebih tepat terhadap kebutuhan masyarakat.

Efisiensi dan transparansi yang dihasilkan oleh penggunaan SIPD turut berperan dalam meningkatkan daya saing

daerah. Dengan sistem yang lebih terorganisir, pengelolaan data, perencanaan pembangunan, serta penganggaran menjadi lebih efisien. Hal ini tidak hanya memperbaiki kualitas tata kelola, tetapi juga memperkuat akuntabilitas pemerintah daerah kepada publik. Peningkatan transparansi ini penting untuk membangun kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan, serta menarik lebih banyak investasi yang diperlukan untuk mendukung program-program pembangunan. Sistem yang efisien dan transparan juga membantu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan sektor publik dan swasta, yang pada akhirnya berkontribusi pada posisi kompetitif daerah.

#### D. Kemampuan Beradaptasi

Kemampuan beradaptasi adalah kesanggupan seseorang atau organisasi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan situasi, lingkungan, maupun tuntutan baru secara cepat dan tepat. Dalam implementasi SIPD di Kabupaten Sidoarjo, kemampuan beradaptasi menjadi aspek penting yang harus dimiliki oleh para pegawai. Hal ini disebabkan karena setiap tahun sistem mengalami pembaruan dan penambahan fitur, termasuk pada tahun 2025 yang perubahannya cukup besar dan signifikan. Gejala kemampuan beradaptasi terlihat jelas ketika pegawai yang berlatar belakang non-IT dapat mengatasi tantangan teknis, berkat dukungan antarpegawai dan pelatihan yang terus-menerus. Adapun hasil wawancara bersama Habibie selaku Pranata Komputer Penyelia Diskominfo Sidoarjo pada tanggal 20 Maret 2025, beliau mengatakan:

*“Pada awalnya penggunaan SIPD cukup sulit karena adanya perubahan signifikan pada tahun 2025 yang membutuhkan waktu pembelajaran. Namun, dengan latar belakang IT, pegawai mampu beradaptasi dengan cepat, sementara kendala utama lebih terletak pada integrasi kebijakan dan alur proses bisnis. Meski demikian, dukungan antarpegawai tetap diberikan terutama bagi yang tidak berlatar belakang IT.”*

Berdasarkan hasil wawancara, dapat diketahui bahwa implementasi SIPD pada awalnya cukup sulit dijalankan karena adanya perubahan signifikan pada tahun 2025 yang menuntut waktu pembelajaran. Namun, pegawai dengan latar belakang teknologi informasi mampu beradaptasi dengan cepat dalam memahami teknis pengelolaan sistem. Adapun hasil wawancara menurut Muti Ulvia Rarani selaku Pranata Komputer Mahir Diskominfo Sidoarjo, pada tanggal 20 Maret 2025, beliau menyatakan:

*“Tidak mudah untuk beradaptasi, tapi jika itu sudah keharusan ya wajib dilakukan intinya selalu mau belajar hal baru”*

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa proses beradaptasi dengan penggunaan SIPD bukanlah hal yang mudah. Namun, karena penerapan sistem tersebut merupakan suatu keharusan, pegawai dituntut untuk terus berusaha menyesuaikan diri. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kemampuan beradaptasi, baik dalam bentuk penguasaan teknis maupun kesiapan mental untuk menerima perubahan, menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas implementasi SIPD di Kabupaten Sidoarjo. Adaptasi yang baik memungkinkan pemerintah daerah tidak hanya mengatasi tantangan teknis dan kebijakan, tetapi juga meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan secara lebih efisien, transparan, dan responsif.

Kemampuan beradaptasi sangat penting dalam menghadapi perubahan, terutama dalam implementasi SIPD di Kabupaten Sidoarjo. Perubahan signifikan pada tahun 2025 mengharuskan pegawai untuk mempelajari sistem baru yang lebih kompleks. Pegawai dengan latar belakang IT dapat beradaptasi lebih cepat, sementara yang tidak membutuhkan waktu dan bantuan lebih banyak. Kendala utama dalam adaptasi terletak pada integrasi kebijakan dan alur proses bisnis, yang membutuhkan penyesuaian di seluruh pemerintahan daerah. Proses ini memerlukan dukungan berkelanjutan dan sikap sabar agar sistem baru dapat diterima dengan baik.

Sikap mental yang terbuka terhadap perubahan sangat menentukan keberhasilan adaptasi. Pegawai diharapkan untuk terus belajar hal-hal baru, terutama terkait teknologi, untuk mendukung kelancaran implementasi SIPD. Selain itu, dukungan sosial antarpegawai memainkan peran penting dalam membantu mereka yang kurang memiliki pengetahuan teknis. Kolaborasi antara pegawai IT dan non-IT memperlancar adaptasi sistem, membangun semangat kerja sama yang mengurangi kesulitan. Dengan adanya dukungan ini, proses adaptasi SIPD dapat berlangsung efektif dan mendukung transformasi digital yang lebih baik di Kabupaten Sidoarjo.

#### E. Daya Tahan Terhadap Perubahan

Daya tahan terhadap perubahan merujuk pada kemampuan individu atau organisasi untuk mempertahankan efektivitas dan produktivitas meskipun ada perubahan yang signifikan dalam sistem, kebijakan, atau lingkungan kerja. Dalam konteks implementasi SIPD di Kabupaten Sidoarjo, daya tahan ini sangat penting karena sistem ini sering mengalami pembaruan atau perubahan, baik dari sisi kebijakan maupun teknologi. Ketika pegawai menghadapi perubahan kebijakan atau penambahan fitur baru dalam SIPD, mereka diharapkan tidak hanya beradaptasi, tetapi juga tetap menunjukkan kinerja optimal. Berikut hasil wawancara Habibie selaku Pranata Komputer Penyelia Diskominfo Sidoarjo pada tanggal 20 Maret 2025, beliau mengatakan:

*“Peran unit kerja pengelola TIK adalah menyiapkan infrastruktur jaringan berkecepatan tinggi agar akses SIPD berjalan lancar. Selain itu, pengelolaan SDM dilakukan secara variatif dengan melibatkan*

*pegawai senior dan generasi muda agar saling melengkapi dalam pengalaman, kecepatan, dan akurasi. Hal ini sejalan dengan tuntutan pimpinan yang mengutamakan kinerja cepat sekaligus akurat dan bertanggung jawab.”*

Berdasarkan hasil wawancara, unit kerja pengelola TIK memiliki peran penting dalam mendukung implementasi SIPD, terutama dengan menyiapkan infrastruktur jaringan berkecepatan tinggi agar akses sistem berjalan lancar. Selain itu, strategi pengelolaan SDM dilakukan dengan melibatkan pegawai senior dan generasi muda sehingga tercipta kolaborasi antara pengalaman, ketelitian, dan kecepatan kerja. Pola ini mendorong adanya transfer pengetahuan sekaligus menjaga keseimbangan kualitas kinerja dalam tim. Adapun hasil wawancara dari Muti Ulvia Rarani selaku Pranata Komputer Mahir Diskominfo Sidoarjo, pada tanggal 20 Maret 2025, menyatakan:

*“Dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, disertai perbaikan sistem sesuai kebutuhan masyarakat, serta dialokasikan anggaran khusus untuk pemeliharaan agar layanan tetap optimal.”*

Berdasarkan hasil wawancara, implementasi SIPD di Kabupaten Sidoarjo tidak hanya terfokus pada pemanfaatan sistem, tetapi juga mencakup aspek pemeliharaan serta keberlanjutan layanan. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala untuk memastikan kinerja sistem berjalan sesuai harapan serta mendeteksi permasalahan sejak dini. Hasil dari monev menjadi dasar perbaikan agar sistem lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan responsif terhadap dinamika pelayanan publik. Pemerintah daerah juga mengalokasikan anggaran khusus untuk pemeliharaan sebagai bentuk komitmen menjaga kualitas layanan.

Implementasi SIPD di Kabupaten Sidoarjo membutuhkan daya tahan terhadap perubahan yang dapat dijaga melalui beberapa faktor kunci. Infrastruktur teknologi yang handal menjadi pondasi utama agar sistem dapat berjalan stabil, mengurangi hambatan teknis yang bisa mempengaruhi keberhasilan implementasi. Budaya kerja yang menekankan kinerja cepat, akurat, dan bertanggung jawab juga memperkuat ketahanan terhadap perubahan, karena setiap pegawai diharapkan dapat menyelesaikan tugas dengan efisien meskipun ada perubahan kebijakan. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara rutin memungkinkan organisasi mendeteksi masalah lebih dini dan melakukan perbaikan tepat waktu.

### **Ekspektasi Usaha (Effort Expectancy)**

Ekspektasi usaha (effort expectancy) merujuk pada persepsi pengguna mengenai sejauh mana kemudahan dalam penggunaan sistem atau teknologi untuk menyelesaikan tugas mereka. Dalam teori UTAUT, ekspektasi usaha menggambarkan sejauh mana individu merasa bahwa penggunaan teknologi akan memerlukan sedikit usaha. Semakin sederhana dan mudah diakses suatu teknologi, semakin besar kemungkinan pengguna untuk mengadopsinya. Berdasarkan kondisi di lapangan, dari hasil wawancara menunjukkan bahwa meskipun SIPD tidak bisa diakses masyarakat, pemerintah Kabupaten Sidoarjo memanfaatkan pengaruh sosial melalui figur pejabat daerah, media resmi, serta mekanisme partisipasi formal. Berikut hasil wawancara bersama Habibie selaku Pranata Komputer Penyelia Diskominfo Sidoarjo pada tanggal 20 Maret 2025, beliau menyatakan:

*“Ya, kalau untuk SIPD ini kan sifatnya internal, hanya bisa diakses ASN atau pihak pemerintah. Tapi pemerintah Kabupaten Sidoarjo bisa mempublikasikan capaian yang sifatnya umum, misalnya realisasi anggaran atau pembangunan jalan. Itu biasanya ditampilkan di website resmi, meskipun kadang menunggu proses selesai. Sebenarnya sekarang akses lebih mudah karena masyarakat rata-rata sudah punya HP, tinggal buka website pemerintah. Cuma masalahnya, banyak masyarakat yang belum terbiasa melihat, tapi sudah memberikan komentar. Jadi strateginya, kami dorong pentingnya literasi digital. Misalnya informasi beasiswa, itu juga bagian dari perencanaan pembangunan yang bisa diakses dengan mudah. Kami berharap masyarakat lebih aktif melihat informasi yang sudah kami sajikan di berbagai kanal.”*

Pernyataan informan menunjukkan bahwa SIPD masih bersifat internal dan hanya dapat diakses ASN. Namun, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tetap berupaya menjaga keterbukaan dengan mempublikasikan capaian umum seperti realisasi anggaran melalui website resmi. Akses sebenarnya sudah mudah dengan dukungan teknologi digital, tetapi kendalanya masyarakat masih kurang terbiasa memanfaatkannya. Pernyataan Habibie, selaras dengan pernyataan Muti Ulvia, beliau menyatakan:

*“Masing-masing OPD atau instansi memiliki media online seperti website, IG, X ataupun TikTok yang dapat dijadikan alat untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat.”*

Dalam hal penyampaian informasi, pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah memanfaatkan berbagai media digital di masing-masing OPD. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah berusaha menghadirkan keterbukaan informasi dengan menyesuaikan media yang banyak digunakan masyarakat. Temuan tersebut sejalan dengan arah pembangunan daerah yang disampaikan dalam seminar oleh Heri dari Bappeda Kabupaten Sidoarjo, bahwa:

*“Digitalisasi merupakan strategi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan ini salah satu upaya mewujudkan e-governance Kabupaten Sidoarjo”*

Melalui visi RPJMD 2021–2026, menekankan tata kelola pemerintahan berbasis digital sebagai salah satu misi penting. Upaya seperti pembangunan jaringan fiber optic, penerapan lebih dari 160 aplikasi layanan publik, serta

pemanfaatan SIPD menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengembangkan e-Governance. Selanjutnya terkait keterlibatan masyarakat, Ibu Muti menjelaskan bahwa partisipasi warga dilaksanakan melalui forum musyawarah, baik di desa maupun melibatkan komunitas. Disebutkan bahwa:

*"Masyarakat dilibatkan dalam Musrenbang desa kalau tidak salah dan juga mengundang komunitas dari masyarakat."*

Maka dari itu, meskipun akses SIPD terbatas, jalur formal partisipasi masyarakat tetap tersedia melalui mekanisme Musrenbang. Namun, permasalahan SIPD yang belum dapat diakses masyarakat secara luas menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas digitalisasi dengan implementasi lapangan. Idealnya, SIPD berfungsi tidak hanya sebagai instrumen teknokratik internal, tetapi juga sebagai sarana partisipatif yang memungkinkan masyarakat ikut memantau dan mengusulkan pembangunan.

Ekspektasi usaha dalam penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kabupaten Sidoarjo berfokus pada persepsi mengenai kemudahan penggunaan sistem oleh pegawai dan masyarakat. Pemerintah berupaya memastikan bahwa meskipun SIPD hanya dapat diakses oleh ASN, informasi yang bersifat umum dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat melalui website resmi. Meskipun terdapat kendala terkait kebiasaan masyarakat yang belum terbiasa mengakses informasi digital, pemerintah mendorong literasi digital untuk meningkatkan partisipasi publik.

### **Faktor Sosial (Social Influences)**

Faktor sosial mencakup elemen-elemen dalam masyarakat yang mempengaruhi perilaku individu dan kelompok, seperti norma sosial, budaya, dan interaksi antarindividu. Dalam kerangka UTAUT, faktor sosial merujuk pada pengaruh yang diberikan oleh orang-orang di sekitar individu, seperti keluarga atau teman, yang dapat memengaruhi keputusan individu untuk mengadopsi suatu sistem atau teknologi. Harapan usaha dalam UTAUT merujuk pada sejauh mana pengguna merasa mudah dalam menggunakan sistem; semakin mudah sistem tersebut digunakan, semakin besar niat pengguna untuk memanfaatkannya. Hal ini dapat dilihat pada implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), di mana kemudahan akses menjadi harapan utama.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa mekanisme investasi di Kabupaten Sidoarjo telah difasilitasi oleh DPM PTSP melalui layanan digital, salah satunya website investasi.sidasokob.go.id. Kehadiran website ini memungkinkan calon investor memperoleh berbagai informasi terkait potensi investasi, jaminan keamanan, hingga bentuk pelayanan tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Habibie:

*"Melalui website-nya PTSP, kalau saya tidak salah itu investasi.sidoarjokab.go.id, itu masyarakat atau calon investor bisa melihat informasi di situ yang potensial seperti apa kalau mau berinvestasi di Sidoarjo. Jadi tidak perlu harus datang, capek-capek datang ke Sidoarjo, tapi bisa dilihat dulu, dibelajari dulu. Memang itu tujuannya adalah untuk mempermudah calon investor mendapatkan informasi, sehingga mendapatkan keyakinan bahwa di Sidoarjo itu memang layak atau potensial untuk berinvestasi."*

Kemudahan ini mencerminkan bahwa pemerintah daerah berusaha mengurangi hambatan teknis dan administratif, sehingga calon investor dapat mengakses informasi secara lebih praktis. Hal ini sejalan dengan konsep harapan usaha, yakni semakin mudah sistem dipahami dan digunakan, semakin tinggi pula niat serta keyakinan pengguna untuk memanfaatkannya. Dengan kata lain, digitalisasi layanan perizinan dan investasi di Sidoarjo bukan hanya mempercepat proses administrasi, tetapi juga meningkatkan kepercayaan investor terhadap investasi di daerah. Kemudahan ini sejalan dengan faktor pendukung arah pembangunan daerah sebagaimana dibahas dalam seminar oleh Heri Dari Bappeda, di mana digitalisasi ditempatkan sebagai strategi penting untuk meningkatkan kualitas layanan publik sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya transformasi layanan investasi secara daring, Sidoarjo tidak hanya mempercepat proses birokrasi tetapi juga menumbuhkan kepercayaan investor untuk berkontribusi pada pembangunan daerah. Hal ini mendukung visi RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2021–2026, khususnya misi mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan membangkitkan kemandirian ekonomi lokal.

Kemudahan akses informasi menjadi faktor penting yang mendukung keberhasilan implementasi SIPD dan turut berperan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan calon investor. Dengan adanya digitalisasi layanan perizinan dan investasi, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berupaya mengurangi hambatan teknis dan administratif, sehingga calon investor dapat mengakses informasi dengan lebih praktis dan transparan. Hal ini sejalan dengan konsep harapan usaha dalam teori UTAUT, yang menyatakan bahwa semakin mudah suatu sistem digunakan, semakin besar pula niat pengguna untuk mengadopsinya. Digitalisasi ini tidak hanya mempercepat proses administrasi, tetapi juga memperkuat kepercayaan investor terhadap potensi investasi di Sidoarjo, yang pada gilirannya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan demikian, transformasi layanan investasi secara daring berfungsi ganda mempercepat birokrasi dan menumbuhkan rasa percaya investor, yang mendukung pencapaian visi RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2021–2026.

### Kondisi yang Memfasilitasi (Facilitating Conditions)

Kondisi yang memfasilitasi adalah suatu keadaan atau faktor yang mendukung suatu sistem untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks organisasi, sistem, atau interaksi sosial, kondisi ini menciptakan lingkungan yang kondusif untuk terjadinya perubahan atau pencapaian hasil yang diinginkan. Kondisi yang memfasilitasi bisa meliputi sumber daya yang tersedia, dukungan sosial, teknologi yang tepat, kebijakan yang mendukung, serta keterbukaan terhadap perubahan dan inovasi.

Menurut Hasil wawancara bersama Nawang Wulan selaku kepala bidang rendalev litbang bappeda kabupaten sidoarjo, menyebutkan beberapa fasilitas dalam mengoperasikan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), diperlukan dukungan perangkat yang memadai baik dari sisi perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, maupun sumber daya manusia. Pada aspek perangkat keras (hardware), SIPD memerlukan server dengan kapasitas besar dan kemampuan pemrosesan data yang kuat, mengingat sistem ini menampung informasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan secara nasional. Selain itu, komputer atau laptop dengan spesifikasi yang memadai menjadi kebutuhan wajib bagi aparat daerah, karena kompleksitas aplikasi SIPD membuat penggunaan smartphone atau perangkat berspesifikasi rendah kurang optimal. Perangkat jaringan seperti router, switch, dan sistem penyimpanan data berbasis NAS atau cloud juga sangat diperlukan untuk menjamin kelancaran konektivitas dan keamanan data. Bahkan, dukungan UPS (Uninterruptible Power Supply) menjadi penting untuk memastikan server tetap berfungsi meskipun terjadi pemadaman listrik.

Dari sisi perangkat lunak, SIPD memerlukan sistem operasi server yang andal, misalnya Linux atau Windows Server, serta sistem manajemen basis data seperti MySQL, PostgreSQL, atau Oracle Database. Aplikasi inti SIPD sendiri berfungsi untuk mengelola perencanaan pembangunan, penganggaran, pelaporan, hingga monitoring yang bersifat terintegrasi. Keberhasilan implementasi SIPD juga sangat dipengaruhi oleh peran administrator sistem, tim IT, dan pengembang aplikasi yang memastikan sistem berjalan lancar. Selain itu, staf pemerintah daerah sebagai pengguna akhir perlu dibekali kemampuan teknis yang memadai agar mampu memanfaatkan SIPD dalam perencanaan, pelaporan, dan pengawasan pembangunan. Namun, Permasalahan utama yang muncul dalam implementasi SIPD adalah kendala teknis pada sistem yang sering mengalami gangguan atau down, sehingga masyarakat tidak bisa mengakses informasi pembangunan secara maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun infrastruktur pendukung seperti laptop, PC, dan jaringan internet sudah dipenuhi, tetap terdapat keterbatasan yang berasal dari sisi pusat. Sebagaimana pernyataan menurut Muhammad Habibie:

*“Kendalanya itu yang paling vital adalah ketika aksesnya sudah dipenuhi oleh seluruh pengguna di seluruh Indonesia, itu kadang-kadang di jam-jam tertentu dia down. Itu ada menu-menu atau fitur yang ketika butuh eksekusi tinggal submit aja misalnya, itu dia harus muter kemudian gagal. Nah itu sebenarnya PR dari dulu, tapi memang karena kendalanya ini ada di pusat jadi kami hanya bisa menyampaikan”*

Kondisi ini memperlihatkan adanya keterbatasan kontrol pemerintah daerah terhadap infrastruktur teknis yang dikelola pusat. Walaupun Diskominfo Sidoarjo memiliki jaringan internal relatif lebih cepat dan tim teknis yang responsif terhadap gangguan lokal, kendala dari pusat tetap menjadi hambatan utama. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa facilitating conditions SIPD di tingkat daerah belum optimal, karena ketersediaan sarana dan dukungan teknis masih dipengaruhi oleh faktor eksternal di luar kendali daerah.

Kondisi yang memfasilitasi dalam implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kabupaten Sidoarjo menunjukkan adanya beberapa hambatan yang harus diatasi. Salah satunya adalah keterbatasan infrastruktur teknis, yang sering menyebabkan downtime atau gangguan sistem ketika volume akses tinggi. Hal ini terjadi karena kapasitas infrastruktur teknologi yang belum mampu mengakomodasi beban akses besar, sehingga menghambat kelancaran operasional SIPD. Selain itu, ketergantungan pada infrastruktur pusat membatasi kemampuan daerah untuk mengatasi kendala teknis secara langsung, yang hanya bisa diselesaikan dengan koordinasi ke pusat. Meskipun kendala tersebut ada, pengakuan dan komunikasi aktif mengenai masalah ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah responsif dan proaktif dalam mencari solusi.

Secara teoretis, implementasi SIPD dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan anggaran dengan menyediakan data keuangan yang lebih akurat dan terintegrasi. Hal ini memungkinkan alokasi sumber daya yang lebih tepat untuk pengembangan regional. Penelitian sebelumnya (DPRD Medan, 2023) menunjukkan bahwa penggunaan SIPD dapat meningkatkan transparansi fiskal, yang pada gilirannya mendukung pengelolaan pembiayaan pembangunan yang lebih baik. Temuan pada studi kasus di Sidoarjo menunjukkan bahwa penerapan SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah belum sepenuhnya berjalan optimal, meskipun sistem ini dirancang untuk mendukung percepatan alokasi anggaran dan penguatan akuntabilitas penggunaan dana. Di Kabupaten Sidoarjo, pemanfaatan SIPD dalam perencanaan pembangunan masih berfokus pada peningkatan transparansi anggaran di tingkat internal pemerintah, sementara keterlibatan dan pemantauan langsung oleh masyarakat masih terbatas.

### Implementasi SIPD dan Dampaknya terhadap Transparansi Fiskal

Secara konseptual, implementasi SIPD yang terintegrasi seharusnya menjadi fondasi transparansi anggaran dan fiskal, karena proses perencanaan, penganggaran, hingga pelaporan berada dalam satu basis data yang dapat ditelusuri. Dalam kerangka tata kelola fiskal, integrasi tersebut berpotensi memperkecil ketidaksesuaian program anggaran, meningkatkan ketertiban administrasi, serta memperkuat jejak akuntabilitas (audit trail) dalam penyusunan dan realisasi anggaran.

Namun, temuan penelitian di Kabupaten Sidoarjo menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas tersebut dengan realitas implementasi. SIPD masih bersifat internal dan hanya dapat diakses oleh aparatur sipil negara (ASN), sedangkan kanal publik mengalami kendala akses dan keamanan. Selain itu, data yang direncanakan untuk dibuka ke publik belum sepenuhnya siap dan cenderung terlambat, sehingga transparansi fiskal belum berjalan optimal. Kondisi ini memperlihatkan bahwa penerapan SIPD belum sepenuhnya berfungsi sebagai sarana transparansi yang memungkinkan masyarakat menilai keterhubungan antara usulan pembangunan, prioritas, alokasi anggaran, dan realisasi program.

Di sisi operasional, terdapat kendala berupa gangguan akses (downtime) pada jam-jam tertentu akibat ketergantungan pada infrastruktur pusat. Hal ini berpotensi mengganggu ritme kerja perangkat daerah, khususnya pada tahap input, verifikasi, dan submit data. Konsekuensi langsungnya adalah meningkatnya risiko keterlambatan proses administrasi penganggaran dan turunnya reliabilitas sistem pada momen eksekusi yang krusial.

### Agenda pembangunan lokal dalam SIPD

Secara teoretis, implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pengelolaan pembiayaan pembangunan daerah, proses penganggaran, dan transparansi fiskal. Dalam konteks pengelolaan pembiayaan daerah, SIPD berperan sebagai landasan yang lebih kuat bagi pemerintah daerah untuk memantau dan mengelola pengeluaran dengan cara yang lebih efisien. Selain itu, SIPD memungkinkan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi sumber pendanaan baru serta mengelola dana yang ada secara lebih terkontrol dan terarah. Hal ini mengarah pada peningkatan akuntabilitas fiskal, karena dengan SIPD, pemerintah daerah dapat memantau aliran dana dan memastikan realisasi anggaran lebih akurat dan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah [33].

Dalam hal proses penganggaran, SIPD menyediakan data keuangan yang lebih akurat dan terkini, yang memungkinkan pemerintah daerah untuk membuat keputusan yang lebih tepat dalam mengalokasikan sumber daya. Keberadaan data yang valid dan real-time ini sangat mendukung konsep anggaran berbasis kinerja, di mana alokasi sumber daya dilakukan secara lebih tepat dan sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan. Dengan menggunakan SIPD, ketidaksesuaian antara rencana pembangunan dan alokasi anggaran dapat diminimalkan, meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah [34].

Sementara itu, terkait dengan transparansi fiskal, SIPD memainkan peran penting dalam memperkuat keterbukaan informasi mengenai keuangan daerah. Dengan sistem ini, pemerintah dapat menyediakan akses informasi yang lebih terbuka kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait lainnya, yang pada gilirannya meningkatkan akuntabilitas publik. Transparansi ini juga berperan dalam memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah. Konsep transparansi fiskal yang ada dalam teori keuangan publik mengemukakan bahwa keterbukaan informasi mengenai anggaran dan alokasi dana publik dapat membantu mengurangi potensi korupsi dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik. Dalam hal ini, SIPD diharapkan tidak hanya menjadi alat administratif, tetapi juga sebagai instrumen untuk mendorong pemerintahan yang lebih akuntabel dan terbuka [35].

Berdasarkan temuan wawancara dan observasi lapangan, hubungan empiris antara implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dengan penganggaran, pembiayaan pembangunan, dan transparansi fiskal di Kabupaten Sidoarjo menunjukkan hasil yang sejalan dengan teori yang telah dijelaskan sebelumnya, meskipun masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi.

Pada aspek penganggaran, temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa SIPD di Kabupaten Sidoarjo telah memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas data perencanaan dan penganggaran. Menurut informan dari Bappeda, dengan adanya SIPD, proses penganggaran menjadi lebih terstruktur dan terintegrasi antar OPD, yang memungkinkan pengalokasian anggaran yang lebih tepat dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah. Sistem ini telah mempermudah pengelolaan alokasi anggaran dengan memberikan akses data yang lebih akurat, yang sejalan dengan prinsip teori public budgeting, yang menyatakan bahwa sistem informasi yang baik dapat memperbaiki pengambilan keputusan anggaran [36]. Namun, meskipun SIPD meningkatkan kualitas penganggaran, kendala teknis, seperti keterlambatan dalam input data dan gangguan sistem, masih menjadi tantangan yang perlu diatasi. Sebagaimana diungkapkan oleh salah satu informan, Muhammad Habibie dari Diskominfo Kabupaten Sidoarjo:

*“SIPD memungkinkan kami memantau dan mengontrol anggaran dengan lebih efektif. Namun, masalah teknis masih menyebabkan keterlambatan dalam penginputan data yang harusnya lebih cepat.”*

Di sisi pembiayaan pembangunan, SIPD di Kabupaten Sidoarjo terbukti membantu pemerintah daerah dalam

mengelola keuangan untuk pembangunan dengan lebih baik. SIPD memberikan kemudahan bagi pemerintah daerah dalam memantau pengeluaran dan mengidentifikasi sumber pendanaan baru. Temuan dari wawancara dengan Diskominfo menunjukkan bahwa sistem ini mempermudah pengelolaan pendapatan daerah dan membantu pemerintah untuk memonitor pengeluaran dengan lebih akurat, yang sesuai dengan teori financial management yang menekankan pentingnya integrasi data keuangan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah [37]. Meski demikian, temuan ini juga mengungkapkan adanya kendala dalam integrasi dengan lembaga lain, yang terkadang menghambat kelancaran sistem. Sebagaimana diungkapkan oleh Muti Ulvia Rarani dari Diskominfo Kabupaten Sidoarjo:

*“Kami bisa lebih mudah mengontrol pengeluaran dan mengidentifikasi pendapatan daerah baru, tetapi integrasi dengan lembaga lain terkadang masih terhambat.”*

Sedangkan pada aspek transparansi fiskal, teori transparansi fiskal menyatakan bahwa keterbukaan dalam pengelolaan dan penggunaan anggaran merupakan kunci utama dalam meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi potensi korupsi. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa SIPD telah membantu meningkatkan transparansi fiskal di Kabupaten Sidoarjo dengan menyediakan akses yang lebih mudah bagi masyarakat untuk memantau keuangan daerah. Sistem ini memberikan transparansi dengan menampilkan informasi yang lebih terstruktur dan terorganisir, namun masih ada kendala dalam aksesibilitas informasi publik, khususnya yang terkait dengan keamanan kanal dan kesiapan data yang dapat menghambat keterbukaan informasi. Kendala teknis ini mengonfirmasi bahwa, meskipun SIPD memberikan kemudahan dalam penyajian data anggaran, akses dan keamanan informasi publik masih menjadi hambatan dalam mencapai transparansi fiskal yang optimal. Sebagaimana disampaikan oleh Muhammad Habibie dari Diskominfo Kabupaten Sidoarjo:

*“Masyarakat bisa memantau alokasi anggaran dan progres pembangunan, tetapi kami masih menemui masalah pada aksesibilitas informasi yang aman dan tepat waktu.”*

Secara keseluruhan, temuan empiris ini menunjukkan bahwa, meskipun SIPD di Kabupaten Sidoarjo telah memberikan dampak positif dalam peningkatan penganggaran, pembiayaan pembangunan, dan transparansi fiskal, beberapa kendala teknis seperti keterlambatan input data, masalah integrasi dengan lembaga eksternal, serta masalah aksesibilitas dan keamanan kanal informasi masih perlu diatasi agar manfaat SIPD dapat dirasakan lebih optimal, khususnya terkait transparansi fiskal publik yang lebih luas.

Hubungan teoretis dan empiris antara SIPD dan pembiayaan pembangunan, penganggaran, serta transparansi fiskal di Kabupaten Sidoarjo memberikan konfirmasi bahwa SIPD berpotensi besar untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Temuan empiris menunjukkan bahwa meskipun SIPD telah memperbaiki banyak aspek pengelolaan keuangan, terutama dalam penganggaran dan pemantauan pembiayaan pembangunan, kendala teknis dan aksesibilitas informasi masih menjadi tantangan yang signifikan. Hal ini memperlihatkan bahwa SIPD memiliki dampak yang lebih besar dalam meningkatkan akuntabilitas internal, namun masih perlu memperbaiki aspek transparansi fiskal publik agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat.

Penelitian ini menunjukkan implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kabupaten Sidoarjo melalui kerangka Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) (Venkatesh et al., 2003) untuk memahami determinan penerimaan dan implikasinya terhadap agenda pembangunan lokal, khususnya pada proses penganggaran, pembiayaan pembangunan, dan transparansi fiskal. Temuan menunjukkan bahwa ekspektasi kinerja menjadi pendorong utama penerimaan SIPD karena sistem dipersepsikan mempercepat pekerjaan, merapikan data, dan meningkatkan kualitas pelaporan, sehingga memperkuat ketertiban administrasi perencanaan penganggaran serta mendukung jejak akuntabilitas internal (audit trail). Ekspektasi usaha didukung oleh pelatihan yang telah dilakukan (meski cenderung berorientasi dasar), serta praktik pembelajaran berkelanjutan di lingkungan kerja; namun, kebutuhan penggunaan fungsi yang lebih kompleks terutama ketika terjadi perubahan sistem menunjukkan bahwa kemudahan penggunaan tidak hanya dipengaruhi antarmuka, tetapi juga kesesuaian alur kerja dan kesiapan kompetensi berbasis peran. Pengaruh sosial muncul melalui kanal komunikasi OPD dan forum partisipatif seperti musrenbang, tetapi belum sepenuhnya menghasilkan transparansi fiskal yang substantif karena SIPD bersifat internal (akses terbatas bagi ASN) dan kanal publik masih menghadapi kendala akses/keamanan serta keterlambatan kesiapan data. Pada sisi kondisi yang memfasilitasi, faktor ini menjadi titik paling kritis karena gangguan layanan/downtime dan ketergantungan pada infrastruktur pusat berpotensi menghambat momen eksekusi penting (input, verifikasi, submit), yang pada akhirnya dapat mengganggu ritme penganggaran dan menahan realisasi manfaat sistem. Secara keseluruhan, SIPD di Sidoarjo cenderung menunjukkan capaian yang lebih kuat pada akuntabilitas internal (efisiensi, integrasi, kerapian data) dibanding transparansi fiskal publik, sehingga dampak SIPD terhadap pembiayaan pembangunan dan keterbukaan anggaran bersifat kondisional menguat ketika stabilitas layanan, kesiapan data, dan keamanan kanal publik terpenuhi.

## VII. SIMPULAN

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa transformasi digital tata kelola daerah melalui SIPD tidak cukup dipahami sebagai keberhasilan adopsi teknologi semata, melainkan sebagai mekanisme tata kelola fiskal yang membutuhkan prasyarat layanan digital yang stabil, tata kelola data yang disiplin, serta kanal informasi publik yang aman dan mudah diakses. Dalam konteks Sidoarjo, SIPD telah memperlihatkan potensi nyata untuk memperbaiki kualitas penganggaran dan pengelolaan pembiayaan pembangunan melalui integrasi data perencanaan anggaran pelaporan, termasuk dukungan kolaborasi lintas pihak yang relevan dengan proses keuangan daerah. Namun, tujuan transparansi fiskal dan partisipasi publik berbasis data masih tertahan oleh keterbatasan akses publik, persoalan keamanan/akses kanal informasi, serta ketidakpastian layanan pada momen eksekusi akibat ketergantungan pada pusat. Karena itu, arah penguatan kebijakan tidak hanya berhenti pada peningkatan kapasitas individu, tetapi perlu beralih pada penguatan sistem layanan: standardisasi penanganan gangguan (SOP submit gagal dan dokumentasi error), jalur koordinasi pusat daerah dengan target penyelesaian yang terukur, penguatan pelatihan berbasis peran untuk memastikan konsistensi kualitas input antar-OPD, serta pemulihan kanal keterbukaan informasi dengan penetapan jenis data wajib tayang dan tenggat publikasi dalam format yang ramah publik. Dengan langkah tersebut, SIPD berpeluang bergerak dari sistem yang dominan meningkatkan efisiensi birokrasi menjadi instrumen yang benar-benar memperkuat kualitas penganggaran, akurasi pembiayaan pembangunan, dan transparansi fiskal yang kredibel, sehingga agenda pembangunan lokal dapat dijalankan secara lebih akuntabel, inklusif, dan berkelanjutan.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bappeda Kabupaten Sidoarjo, khususnya Ibu Nawang Wulan dan Bapak Heri Susanto, serta Diskominfo Kabupaten Sidoarjo, terutama Bapak Muhammad Habibie dan Ibu Muti Ulvia Rarani, atas izin penelitian dan data yang diberikan. Apresiasi juga disampaikan kepada Bapak Eko Susanto dari Diskominfo Jawa Timur dan Bapak Ahmad Riyadh atas wawasan berharganya. Selain itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing atas arahan dan masukan yang konstruktif, serta kepada Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo atas dukungan akademik yang memungkinkan penelitian ini terselesaikan dengan baik. Tak lupa, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada orang tua, keluarga, dan teman-teman yang telah memberikan doa, motivasi, dan dukungan moral selama proses penelitian hingga artikel ini dapat diselesaikan.

## REFERENSI

- [1] J. J. P. Latupeirissa, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Desa Tegal Kertha Denpasar," *Gov. J. Ilm. Kaji. Polit. Lokal dan Pembang.*, vol. 10, no. 2, pp. 114–119, 2023.
- [2] F. Inayah, H. A. Hikmah, and L. Hasanah, "Pengembangan Potensi Lokal Desa Sebagai Upaya dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Tipar," *Pedamas (Pengabdian Kpd. Masyarakat)*, vol. 2, no. 2, pp. 799–808, 2023.
- [3] H. Turmudi, "Pembangunan Desa : Pemanfaatan Potensi Desa Berbasis Kearifan lokal di Tawangsari Kabupaten Boyolali," *Fundam. J. Ilm. Huk.*, vol. 12, no. 1, pp. 43–61, 2023, doi: 10.34304/jf.v12i1.84.
- [4] T. A. Triono, "Konsep Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal: Hamemayu Hayuning Bawana Di Daerah Istimewa Yogyakarta," *J. Soc. Bridg.*, vol. 3, no. 1, pp. 27–38, 2025, doi: 10.59012/jsb.v3i1.64.
- [5] A. Kartika and D. Iskandar, "Meneropong Penerapan E-Government Di Kabupaten Sidoarjo," *Wacana J. Ilmu Sos. dan Ilmu Polit. Interdisiplin*, vol. 8, no. 2, pp. 276–282, 2021.
- [6] Desry J. Louhenapessy, "Analisis Isu Dan Masalah Pembangunan Ekonomi Provinsi Kepulauan," *Monet. J. Ekon. dan Keuang.*, vol. 1, no. 4, pp. 197–211, 2023, doi: 10.61132/moneter.v1i4.98.
- [7] M. R. Alfaris, "Analisis Isu Dan Masalah Pembangunan Ekonomi Daerah Kabupaten Kudus," *J. Ekon. Bisnis dan Sos. Sains*, vol. 03, pp. 119–129, 2024.
- [8] Gusnar Ismail, "Implementasi Otonomi Daerah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19," *J. Lemhannas RI*, vol. 8, no. 3, pp. 190–205, 2022, doi: 10.55960/jlri.v8i3.342.
- [9] S. Yulia and E. Supriatna, "Kontribusi Masyarakat Dalam Menentukan Arah Pembangunan Ekonomi Global Yang Berkelanjutan Di Indonesia," *Educ. J. Pendidik.*, vol. 2, no. 2, pp. 1–8, 2024.

- [10] P. A. Fauziana, Ardiansyah, “Analisis rendahnya partisipasi masyarakat pada forum musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) di desa kenawat kecamatan lut tawar kabupaten aceh tengah,” *J. Ilm. Mhs. FISIP USK*, vol. 09, no. 04, pp. 1–12, 2024.
- [11] S. P. Collins *et al.*, “Efektifitas Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pendekatan Partisipasi Masyarakat Desa,” vol. 3, no. 3, pp. 167–186, 2021.
- [12] I. Setiawan, N. Derenov, B. Arti, and P. Publik, “Hubungan Inovasi Pemerintahan Terhadap Restrukturisasi Pemerintahan Di Indonesia,” vol. 14, no. 2, pp. 234–248, 2024, doi: 10.33701/jiapd.v16i2.4824.
- [13] N. R. Sellfia, U. Dayat, and L. Aryani, “Inovasi pelayanan publik berbasis e-government dalam aplikasi sampurasun Purwakarta,” *Kinerja*, vol. 18, no. 4, pp. 590–598, 2022, doi: 10.30872/jkin.v18i4.10363.
- [14] R. Rame, P. Purwanto, and S. Sudarno, “Industry 5.0 and sustainability: An overview of emerging trends and challenges for a green future,” *Innov. Green Dev.*, vol. 3, no. 4, p. 100173, 2024, doi: 10.1016/j.igd.2024.100173.
- [15] T. Rulandi and J. J. C. Tambotoh, “Analisis Penerimaan Teknologi Pembelajaran Dalam Jaringan Menggunakan Unified Theory of Acceptance And Use of Technology 2,” *J. Sains Komput. Inform. (J-SAKTI)*, vol. 7, no. 1, pp. 126–137, 2023, doi: 10.30645/j-sakti.v7i1.577.
- [16] T. Syeftiani and M. A. Saadah, “Responsivitas Dan Transparansi Pemerintah Kota Yogyakarta Dalam Menangani Keluhan,” *PUBLIKA J. Ilmu Adm. Publik*, vol. 9, no. 1, pp. 99–114, 2023, doi: 10.25299/jiap.2023.vol9(1).12719.
- [17] Nurlaila Nurlaila, Zuriatin Zuriatin, and Nurhasanah Nurhasanah, “Transformasi Digital Pelayanan Publik: Tantangan dan Prospek dalam Implementasi E-Government di Kabupaten Bima,” *Public Serv. Gov. J.*, vol. 5, no. 2, pp. 21–37, 2024, doi: 10.56444/psgj.v5i2.1468.
- [18] D. Alfani and J. Nasution, “Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara,” *J. Pendidik. Tambusai*, vol. 6, no. 1, pp. 4036–4043, 2022.
- [19] T. Saputra and A. Frinaldi, “Systematic Literature Review Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Digital,” *Menara Ilmu*, vol. 17, no. 1, pp. 116–124, 2023, doi: 10.31869/mi.v17i1.4534.
- [20] M. Suthalis and E. Novaria, “Literasi Digital Dan Pelayanan Publik Yang Baik,” *Acad. J. Inov. Ris. Akad.*, vol. 4, no. 1, pp. 17–23, 2024, doi: 10.51878/academia.v4i1.2812.
- [21] H. Suriadi, A. Frinaldi, L. Magriasti, and L. Yandri, “Desentralisasi Dan Upaya Peningkatan Otonomi Daerah: Menuju Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia,” *Menara Ilmu*, vol. 18, no. 1, pp. 27–36, 2024, doi: 10.31869/mi.v18i1.4869.
- [22] F. Imansyah *et al.*, “Mendorong Perekonomian Desa: Media Promosi Digital Sebagai Pendorong Penjualan Produk Stick Udang Kelompok Mentari Desa Sungai Kupah,” *J. Abdi Insa.*, vol. 11, no. 3, pp. 2229–2240, 2024, doi: 10.29303/abdiinsani.v11i3.1647.
- [23] M. D. Setiyowati and O. Reviandani, “Penerapan Prinsip Utama Good Governance Pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Di Bappeda Kabupaten Sidoarjo,” *J. Prog. Adm. Publik*, vol. 4, no. 1, pp. 117–125, 2024, doi: 10.37090/jpap.v4i1.1251.
- [24] N. Monica Hidayat, M. Nasrullah, and N. Pudji Istyanto, “Analisis Unified Theory Of Acceptance And Use Of Technology (UTAUT) Terhadap Penerimaan Adopsi Teknologi E-Learning Pada Fitur Video Conference Di Kalangan Mahasiswa Kampus Baru (Studi Kasus: ITTelkom Surabaya),” *J. Technol. Informatics*, vol. 4, no. 1, pp. 18–25, 2022, doi: 10.37802/joti.v4i1.258.
- [25] R. Hardiansyah and T. Jaffisa, “Peran Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Meningkatkan Pelayanan Publik yang Efektif dan Transparan (Studi Kasus Pada Kantor Badan ...),” *Innov. J. Soc. Sci. ...*, vol. 4, pp. 5194–5206, 2024, doi: //doi.org/10.31004/innovative.v4i4.13709.
- [26] M. D. Wahyuni, I. P. D. Rimbawan, and E. V. Awak, “Implementasi Kebijakan Desentralisasi Dalam Meningkatkan Efektivitas Pemerintahan Daerah Di Indonesia,” *J. Ilm. Cakrawarti*, vol. 7, no. 2, pp. 93–98, 2024, doi: 10.47532/jic.v7i2.1100.

- [27] R. Adawiali, S. Setyawan, A. Triyono, E. P. Saputro, H. Siswanto, and J. Triyanto, “Adopsi Inovasi Program SIMADE (Sistem Informasi Manajemen Desa/Kelurahan) di Desa Papahan Kabupaten Karanganyar,” *J. Keilmuan dan Keislaman*, pp. 106–127, 2022, doi: 10.23917/jkk.v1i3.18.
- [28] S. L. Lumbantobing, H. Kusmanto, and B. Ginting, “Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah pada Penerapan E-Planning dalam Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Pakpak Bharat,” *Perspektif*, vol. 11, no. 4, pp. 1546–1558, 2022, doi: 10.31289/perspektif.v11i4.7227.
- [29] N. Elsha, S. Atikah, and I. P. Lenap, “Pembelajaran Akuntansi Secara Online: Pengujian Model Unified Theory Of Acceptance Dan Use Of Technology (UTAUT),” *Balanc. J. Akunt. dan Manaj.*, vol. 1, no. 3, pp. 292–300, 2022, doi: 10.59086/jam.v1i3.171.
- [30] D. Nur, L. Sifa, L. Dyastari, G. Communications, and D. Samarinda, “Komunikasi Pemerintah dalam Penyebaran Informasi Publik melalui Website pada Diskominfo Kota Samarinda Government Communication in Disseminating Public Information via the Website at Diskominfo Samarinda City,” *J. Ilmu Pemerintah*, vol. 12, no. 5, pp. 66–75, 2024.
- [31] H. Alfiani, S. Kurnia Aditya, S. Lusa, D. Indra Sensuse, P. A. Wibowo Putro, and S. Indriasari, “E-Government Issues in Developing Countries Using TOE and UTAUT Frameworks: A Systematic Review,” *Policy Gov. Rev.*, vol. 8, no. 2, p. 169, 2024, doi: 10.30589/pgr.v8i2.932.
- [32] Reva Ngulya Savi’ah, Joko Tri Nugraha, Yuni Kurniasih, and Matheus Gratiano Mali, “Analysis Of Use Behavior In The Perspective Of The UTAUT In The Procurement Of Government Goods And Services At The Regional Secretariat Of Magelang City,” *J. Info Sains Inform. dan Sains*, vol. 14, no. 02, pp. 118–132, 2024, doi: 10.54209/infosains.v14i02.4377.
- [33] I. Brusca, “No Title,” *Implement. Perform. Report. Local Gov. A Cross-Countries Comp.*, 2016, doi: <https://doi.org/10.1080/15309576.2015.1137768>.
- [34] Z. L. and R. S. Edwin Lau, “No Title,” *Challenges Meas. Public Sect. Product. OECD Ctries.*, 2014.
- [35] N. F. Kamila and W. Pangestoeti, “Economic Reviews Journal,” vol. 4, pp. 235–244, 2025, doi: 10.56709/mrj.v4i1.632.
- [36] I. S. Rubin, *The Politics of Public Budgeting: Getting and Spending, Borrowing and Balancing*. 2017.
- [37] M. Kardina, A. Frinaldi, and N. E. Putri, “Penilaian Penggunaan Teknologi Informasi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Dampaknya Terhadap Kinerja Pelayanan Publik Di Indonesia,” vol. 11, no. 2, pp. 615–620, 2024.

**Conflict of Interest Statement:**

*The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.*